

Gerakan Perempuan Hadapi Ancaman

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun ada sejumlah pencapaian di bidang politik dan hukum, selama 20 tahun reformasi, gerakan perempuan di Tanah Air masih diwarnai berbagai tantangan di berbagai bidang. Bidang budaya mengalami ancaman paling serius karena norma-norma intoleran mewarnai kurikulum pendidikan, termasuk pengajaran sastra, seni, dan kemanusiaan direduksi dalam pengajaran agama yang intoleran.

"Impian untuk membangun budaya politik baru berlandaskan etika kepedulian justru sedang menghadapi tantangan berat oleh sikap intoleran dan egoisme kelompok, politik brutal, dan *divide et impera* (pecah belah), korup, serta maraknya teror bom bunuh diri yang menggunakan perempuan dan anak," ujar Ketua Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Azriana Manalu, Minggu (20/5/2018), di Jakarta.

Azriana, didampingi komisioner Komnas Perempuan, antara lain Mariana Amiruddin, Yuniyanti Chuzaifah, Indriyati Suparno, dan Adriana Venny, menyampaikan "Refleksi 20

Tahun Reformasi, Keterlibatan Perempuan, dan Demokrasi Pasca 1998".

Komnas Perempuan menilai narasi gerakan perempuan menghadapi tantangan berat dalam menciptakan wacana reformasi dan demokrasi. Kurikulum di semua tingkatan pendidikan diwarnai norma intoleran. Anak-anak dibentuk untuk intoleran, anti terhadap komunitas di luar dirinya, bahkan dibenarkan untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang mereka tempatkan liyan.

Sementara perempuan diatur mulai dari cara berpakaian, mengembangkan kapabilitasnya, hingga memilih pasangan hidup, perkawinan, dan menentukan jumlah anak. "Norma intoleran ini justru hadir untuk menghancurkan etika kepedulian yang 20 tahun berusaha dibangun oleh gerakan perempuan," ujar Yuniyanti.

Komnas Perempuan juga menilai iklim politik di Tanah Air selama 20 tahun terjebak dalam polarisasi politik untuk mendukung dinasti dan oligarki politik. Selain itu, ada fenomena yang berkembang, yakni menguatnya politik identitas

yang menyuburkan tumbuhnya gerakan-gerakan atas nama agama yang menggunakan cara teror dan mendomestikkan kembali perempuan.

Refleksi 20 Tahun Reformasi dilanjutkan dengan diskusi bersama sejumlah tokoh perempuan, yakni Musdah Mulia (Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace), Ruth Indiah (peneliti di Institut Kajian dan Strategi Pembangunan Alternatif), Ani Sucipto (pengamat politik Universitas Indonesia), Misiyah (Direktur Kapal Perempuan), Atnike Sigiro (Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan), serta Anindya Restuviani (aktivis Jakarta Feminist Discussion Group).

Menurut Ruth, untuk menegakkan kembali etika kepedulian yang selama ini dibangun oleh gerakan perempuan, para perempuan harus keluar dari polarisasi politik.

Selain itu, menurut Misiyah, kesadaran kritis perempuan di semua tingkatan juga harus terus didorong. "Tidak bisa dibiarkan berjalan alamiah, tetapi harus didesain dan dikembangkan," ujarnya. (SON)